

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Hariadi (2022) dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda”** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori menurut George Charles Edwards III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun penelitian lapangan yang digunakan adalah melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari komunikasi atau transmisi yang dilakukan implementor kepada target sasaran berjalan dengan baik. Sumber daya manusia di Kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri dalam pelaksanaan program BKR sudah memadai. Namun dari segi anggaran, kelompok BKR Kampung KB Suwandi Mandiri tidak menerimanya secara rutin. Begitu juga dengan sumber daya fasilitas yang tidak memadai, kegiatan BKR hanya mengandalkan fasilitas yang tersedia saja walaupun tidak memadai. Para implementor khususnya dalam hal ini Kader BKR Kampung KB Suwandi Mandiri mempunyai komitmen, kejujuran dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program

BKR. Beberapa kendala yang ditemui dalam Implementasi Program BKR di Kampung KB Suwandi Mandiri Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yaitu terkait keterbatasan pelaksanaan kegiatan akibat Pandemi Covid 19, keterbatasan sumber daya anggaran dan keterbatasan sumber daya fasilitas.

2. Futiha Albab (2021) dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera dalam Upaya Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak: Studi Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang”** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini memaparkan bagaimana implementasi program tribina keluarga sejahtera dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, dan faktor pendukung serta penghambat program tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Program Tribina Keluarga Sejahtera merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pembinaan yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan keluarga. Terdiri dari kelompok kegiatan BKB, BKR, dan BKL. Dengan kebijakan yang ada menunjukkan pemerintah sangat peduli terhadap upaya mencegah tindakan eksploitasi anak, namun program

tersebut kurang optimal dalam pelaksanaannya. Dengan minimnya pemahaman serta strategi dalam mengimplementasikan kebijakan oleh subjek program sehingga kurang efektif dalam upaya mencegah tindakan eksploitasi anak berdasarkan data di lapangan. 2) terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi program namun urgensinya sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan mencegah tindakan eksploitasi anak demi mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dua penelitian terdahulu yang tertera diatas adalah penelitian Hariadi (2022) hanya berfokus pada implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR), sehingga ruang lingkupnya lebih sempit karena meneliti satu bagian dari Program Tribina. Sementara itu, penelitian Futiha Albab (2021) telah meneliti Program Tribina, namun konteks penelitiannya diarahkan pada peran program tersebut dalam pencegahan tindakan eksploitasi anak, sehingga fokusnya lebih tematik dan berorientasi pada isu perlindungan anak, bukan pada pelaksanaan program secara struktural dan teknis. Meskipun penelitian Hariadi dan Albab juga menggunakan teori George C. Edwards III, namun penelitian ini menggunakan teori tersebut secara lebih teknis untuk menganalisis implementasi melalui variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga berbeda dari segi temuan, di mana hambatan utama yang ditemukan berkaitan dengan kurangnya sosialisasi, kemampuan kader, dan ketidakteraturan jadwal pelaksanaan program. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji implementasi Program Tribina secara menyeluruh. Penelitian ini juga merupakan penelitian pertama di STIA

Amuntai yang membahas tentang Implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun persamaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama menggunakan teori George Charles Edwards III.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2022:1) “Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan terbaik.”

Kebijakan publik menurut Indra Kertati, dkk. (2023:1) secara umum dapat didefinisikan sebagai “Sebuah sistem berupa regulasi yang merupakan tindakan pengaturan, atau prioritas pendanaan mengenai topik tertentu yang diumumkan oleh entitas pemerintah. Dalam arti luas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam mengatur masyarakat.”

Sementara itu, menurut Anderson dalam Marwiyah (2022:12) mendefinisikan ‘Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.’

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2021:2) ‘Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publipolicy is whatever governments choose to do or not to do*).’

b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Marwiyah (2022:13) antara lain:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

- 2) Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive

Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- 3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Marwiyah (2022: 14-16) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada di dalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

- 2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam

agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones dalam Syahrudin (2019:28), dimana implementasi diartikan sebagai "*getting a job done*" dan "*doing a.*" Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut *resources*.

Sementara itu menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Marwiyah (2022:36) melihat 'Implementasi adalah sebagai

pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.’

Sedangkan menurut Wahab dalam Marwiyah (2022:36) ‘Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.’

Menurut Riant dalam Joko Pramono (2022:2) ‘Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada dua langkah yang mungkin dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. baik secara langsung berupa program maupun merumuskan strategi turunan atau turunan dari strategi tersebut. Kebijakan publik berupa undang-undang atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kejelasan kebijakan publik dan sering disebut perintah eksekutif. Kebijakan publik yang bersifat operasional langsung meliputi perintah presiden, instruksi presiden, perintah menteri, perintah direktur daerah, dan perintah direktur.’

b. Model Implementasi Kebijakan

1) Model George C. Edward III

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III dalam Leo Agustino (2022:154-158) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada

tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap

implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrasi, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2022:150-153) ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak memengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

3) Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2022:159) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - (1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

4) Model Charles O. Jones

Menurut Jones dalam Leo Agustino (2022:169-170) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

5) Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2021:101) ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:

- a) Kondisi lingkungan;
- b) Hubungan antar organisasi; Sumberdaya organisasi untuk
- c) implementasi program;
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

6) David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining dalam Subarsono (2021:103-104) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a) Logika kebijakan;
- b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan; dan
- c) Kemampuan implementor kebijakan.

3. Program Tribina

Tribina adalah salah satu program utama yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam

rangka membangun dan meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga. Kata Tribina sendiri merupakan gabungan dari tiga jenis kegiatan pembinaan keluarga, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada keluarga agar dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tahapan usia anggota keluarganya.

Melalui kegiatan Tribina, keluarga diberikan edukasi, pendampingan, dan berbagai aktivitas yang mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini, pembinaan mental dan sosial anak remaja, hingga perawatan yang tepat bagi anggota keluarga yang sudah lanjut usia. Dengan demikian, Tribina tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari perhatian negara terhadap kualitas keluarga Indonesia secara menyeluruh.

a. Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita atau disingkat BKB adalah program yang ditujukan kepada keluarga yang memiliki anak usia balita, yaitu anak yang berusia 0 sampai 5 tahun. Dalam program ini, orang tua khususnya ibu diberikan pembinaan dan informasi mengenai pola asuh anak yang benar, mulai dari cara memberi makan, cara berkomunikasi dengan anak, pemberian rangsangan untuk tumbuh kembang, hingga pemantauan kesehatan anak secara berkala. Kegiatan BKB dilakukan dalam bentuk kelompok BKB di kelurahan, yang dipandu oleh kader atau penyuluh KB. Melalui kelompok ini,

para orang tua bisa saling berbagi pengalaman, belajar dari ahli (misalnya petugas puskesmas), dan memantau tumbuh kembang balita.

Tujuan utama dari BKB adalah membantu orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Program ini juga sangat berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencegah stunting dan membangun generasi yang sehat dan cerdas sejak usia dini.

b. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja atau BKR adalah program pembinaan yang diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anak remaja, biasanya yang berusia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa yang sangat penting karena pada fase ini, seseorang mengalami banyak perubahan baik fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam membimbing, mengawasi, dan mendampingi remaja agar tidak salah arah.

Melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) ini, orang tua diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak remaja, bagaimana membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya, serta bagaimana menangani permasalahan khas remaja saat ini seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan risiko pernikahan dini.

Program BKR juga berperan dalam mendukung Generasi Berencana (Genre), yaitu program yang mengajak remaja untuk merencanakan masa depannya dengan baik, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Remaja diajarkan untuk mengenali perubahan dalam dirinya dan diajak untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki cita-cita.

Tujuan utama Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah menyiapkan kehidupan remaja agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan yang bijak, serta menghindari perilaku berisiko yang bisa merusak masa depan mereka.

c. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia atau BKL adalah program pembinaan yang diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (lansia). Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas dan bagian dari keluarga yang tetap harus diperhatikan dan diberdayakan. Dalam program BKL, keluarga diajak untuk memahami kebutuhan lansia, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Melalui kegiatan BKL, anggota keluarga diberikan informasi mengenai cara merawat lansia, cara berkomunikasi yang baik dengan lansia, serta cara menjaga kesehatan dan aktivitas fisik lansia agar tetap produktif dan mandiri. Selain itu, lansia juga diberikan ruang untuk berkegiatan bersama, seperti senam lansia, pemeriksaan kesehatan rutin, diskusi kelompok, dan kegiatan keagamaan atau

sosial lainnya. Kegiatan BKL meliputi pendampingan dan pelayanan sosial lansia mulai dari sosialisasi sampai terminasi seperti penyuluhan, temu keluarga, kunjungan rumah, pencatatan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

BKL bertujuan untuk membangun kesadaran keluarga agar tidak mengabaikan lansia, serta menciptakan lingkungan yang ramah lansia, di mana mereka tetap merasa dihargai dan memiliki peran dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya BKL, diharapkan lansia dapat menjalani masa tuanya dengan sehat, bahagia, dan bermartabat.

Secara umum, Program Tribina (BKB, BKR, dan BKL) merupakan strategi pemerintah dalam membangun kualitas keluarga Indonesia dengan pendekatan yang menyeluruh dari usia balita, remaja, hingga lansia. Setiap tahapan usia memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, dan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Melalui kegiatan yang dilakukan dalam Tribina baik itu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), keluarga diharapkan mampu mengasuh anak secara optimal, mendampingi remaja agar terhindar dari hal-hal negatif, dan merawat lansia dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Program ini merupakan upaya konkrit dalam menciptakan keluarga yang tangguh, harmonis, dan sejahtera.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem informasi Keluarga, maka pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan program pembinaan keluarga berkelanjutan yang dikenal dengan nama Program Tribina, yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tribina di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan, serta bagaimana faktor-faktor pendukung maupun penghambat memengaruhi pencapaian tujuan program tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori tentang Implementasi menggunakan teori menurut George Charles Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158). Dalam teori tersebut ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

